

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI TERKAIT
PELANGGARAN PENGELOLAAN LIMBAH *FLY ASH BOTTOM ASH*
PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP OMBILIN DI KOTA
SAWAHLUNTO**

*Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

MUHAMMAD NATHAN ALGHIFARI
2210112083

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM (PK VIII)**



Pembimbing :

**Dr. Syofiarti, SH., M.Hum
Amelia Zulfitri, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2026

No.Reg : 17/PK-VIII/II/2026

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN TERHADAP
PELANGGARAN PENGELOLAAN LIMBAH *FLY ASH BOTTOM ASH* OLEH
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP OMBILIN DI KOTA
SAWAHLUNTO**

*(Muhammad Nathan Alghifari, 2210112083, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 80 halaman, 2026)*

ABSTRAK

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan usaha dan/atau kegiatan. permasalahan pengelolaan limbah *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) oleh PLTU Ombilin di Kota Sawahlunto yang menimbulkan polemik hukum dan lingkungan setelah perubahan status FABA dari limbah B3 menjadi limbah non-B3 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Meskipun telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021, dalam praktiknya masih ditemukan indikasi ketidaksesuaian pengelolaan serta persoalan efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan. Permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengelolaan limbah FABA oleh PLTU Ombilin berdasarkan Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021; dan (2) bagaimana pelaksanaan penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap pelanggaran pengelolaan limbah FABA tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan FABA oleh PLTU Ombilin secara normatif mengacu pada Pasal 4 ayat (6) Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 yang meliputi penyimpanan, pemanfaatan, dan penimbunan. Namun dalam implementasinya masih terdapat ketidaksesuaian pada aspek teknis penyimpanan, optimalisasi pemanfaatan, serta pengendalian dampak lingkungan dari penimbunan. Dari sisi penegakan hukum administrasi, pengawasan dan pemberian sanksi telah dilakukan oleh instansi berwenang, tetapi belum sepenuhnya efektif karena belum menimbulkan efek jera dan masih ditemukannya pelanggaran berulang. Dengan demikian, pengelolaan dan penegakan hukum terhadap FABA oleh PLTU Ombilin belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup dan kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan limbah FABA oleh PLTU Ombilin masih memerlukan perbaikan secara substansial serta penguatan penegakan hukum lingkungan administrasi agar perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat dapat terwujud secara efektif.

Kata Kunci: Pengelolaan Limbah, *Fly Ash* dan *Bottom Ash*, Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi, PLTU Ombilin

**ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT AGAINST
VIOLATIONS IN THE MANAGEMENT OF FLY ASH AND BOTTOM ASH
WASTE BY THE OMBILIN COAL FIRED-POWER PLANT IN
SAWAHLUNTO CITY**

*(Muhammad Nathan Alghifari, 2210112083, Faculty of Law, Andalas University,
80 pages, 2026)*

ABSTRACT

Environmental management constitutes a legal obligation aimed at preventing environmental pollution and/or degradation resulting from business and/or industrial activities. The issue of fly ash and bottom ash (FABA) waste management by Ombilin Coal-Fired Power Plant in Sawahlunto City has generated legal and environmental controversy following the reclassification of FABA from hazardous and toxic waste (B3) to non-hazardous waste under Government Regulation Number 22 of 2021. Although further regulated under Minister of Environment and Forestry Regulation Number 19 of 2021, in practice there remain indications of non-compliance in waste management as well as concerns regarding the effectiveness of administrative environmental law enforcement. The legal issues addressed in this study are: (1) how FABA waste is managed by the Ombilin Power Plant in accordance with Ministerial Regulation No. 19 of 2021; and (2) how administrative environmental law enforcement is implemented in response to violations of FABA waste management. This research employs an empirical juridical method. The data were analyzed qualitatively by examining the conformity between legal norms and their implementation. The findings indicate that normatively, FABA management by the Ombilin Power Plant refers to Article 4 paragraph (6) of Ministerial Regulation No. 19 of 2021, which includes storage, utilization, and disposal. However, in practice, there are still inconsistencies in technical storage standards, optimization of utilization, and environmental impact control related to disposal activities. From the perspective of administrative law enforcement, supervision and administrative sanctions have been imposed by the competent authorities, yet they have not been fully effective due to the lack of deterrent effect and the persistence of repeated violations. In conclusion, FABA waste management and administrative environmental law enforcement at the Ombilin Power Plant require substantial improvement and stronger enforcement mechanisms to ensure effective environmental protection and the fulfillment of the community's right to a good and healthy environment.

Keywords: Waste Management, Fly Ash and Bottom Ash, Administrative Environmental Law Enforcement, Ombilin Coal-Fired Power Plant.